

TENTANG EKSISTENSIALITAS: PERSPEKTIF HEIDEGGERIAN TERHADAP PROGRAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

Feriyansyah*, Siti Murtiningsih

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*feriyansyah@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article discusses the application of Heideggerian perspectives on existentialism in civic education programs in Indonesia and their critique on the construction of knowledge and the implementation of citizenship values in the education system. The research findings indicate that the concepts of authenticity and ontological education in civic education complement each other in developing individuals as citizens who have a deep understanding of themselves, social responsibility, and the meaning of existence. This approach also prepares them to face the challenges of globalization and world changes, considering the social and historical contexts that influence individuals, thus fostering a caring, responsible, and knowledgeable society. However, the development of civic education programs at the tertiary level in Indonesia needs to consider the critique from Heideggerian perspectives to balance empowering individuals to seek personal life meaning and developing citizenship values inherent in individuals as citizens. Higher education civic education is expected to produce citizens with intellectual competence and strengthen their sense of social responsibility through civic engagement as young citizens in building an inclusive, just, and harmonious public sphere.

Keywords: heideggerian; existentialism; civic education

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan perspektif Heideggerian tentang eksistensialisme dalam program pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta kritiknya terhadap konstruksi pengetahuan dan implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa konsep autentisitas dan pendidikan ontologis dalam pendidikan kewarganegaraan saling melengkapi untuk mengembangkan individu sebagai warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri, tanggung jawab sosial, dan makna keberadaan. Pendekatan ini juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan dunia dengan memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu, sehingga membentuk masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan berpengetahuan luas. Namun, pengembangan program pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia perlu mempertimbangkan kritik perspektif Heideggerian untuk mencapai keseimbangan antara pemberdayaan individu dalam mencari makna kehidupan pribadi dan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yang melekat pada individu sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial melalui keterlibatan kewarganegaraan sebagai warga negara muda dalam membangun ruang publik yang inklusif, adil, dan harmonis.

Kata kunci: heideggerian, eksistensialisme, pendidikan kewarganegaraan



Sejarah Artikel: Dikirim 23 Juni 2023 | Direvisi hingga 31 Oktober 2023

Diterima 8 November 2023 | Dipublikasikan 31 Maret 2024

Copyright © 2024, Feriyansyah, Siti Murtiningsih

This is Open Access under the CC-BY-SA License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI: [10.24114/jk.v21i1.48037](https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.48037)

PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu dari empat mata kuliah wajib umum (MKWU) sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah wajib umum sebagai bagian integral dalam pengembangan kurikulum program studi pada perguruan tinggi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang wajib diikuti semua mahasiswa pada berbagai program studi sebagai usaha membentuk warga negara yang cerdas peduli dan bertanggung jawab sebagai seorang warga negara yang menyandang gelar sarjana. Gelar sarjana merupakan kualifikasi akademik pada level 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu seorang warga negara yang mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan suatu bidang keilmuan secara mandiri dengan berpikir kritis untuk berkontribusi dalam penelitian dan perkembangan kajian dalam program studi tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi dasar untuk membangun kesadaran untuk peduli terhadap negara dengan berbagai bidang kehidupan seperti hukum, demokrasi, hak asasi manusia dan nilai-nilai kewarganegaraan. Sehingga perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu mengelaborasi kompetensi kualifikasi sebagai seorang sarjana dalam diri seorang warga negara muda sehingga mampu menghadirkan warga negara yang mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara (Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Beberapa waktu belakangan banyak artikel ilmiah dalam bidang pendidikan menggunakan pemikiran filsafat Martin Heidegger. Pandangan Heidegger tentang modernisme dan Pendidikan membahas bagaimana konsep otentisitas Heidegger dapat diterapkan dalam konteks pendidikan untuk mengatasi krisis spiritual dan kultural yang dihasilkan oleh pandangan modernistik terhadap dunia (Trubody, 2015, hal. 16–17). Salah satu pandangan Heidegger yang menarik adalah kritiknya terhadap modernisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Dalam konteks ini, konsep otentisitas Heidegger dapat diterapkan sebagai sarana untuk mengatasi krisis spiritual dan kultural yang timbul akibat pandangan modernistik terhadap dunia. Dengan memahami konsep otentisitas, pendidikan dapat mengarahkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri, hubungan mereka dengan dunia, dan nilai-nilai yang sebenarnya penting. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi tantangan yang dihasilkan oleh pandangan modernistik dan memberikan solusi yang lebih holistik dan berarti bagi perkembangan spiritual dan kultural siswa.

Peristiwa besar seperti perang, revolusi industri, revolusi politik yang terjadi antara akhir abad ke-19 dan sampai abad ke-20 menghadirkan “momen eksistensial” yaitu realitas kemanusiaan yang meningkatkan kecemasan tentang kematian, kebebasan, kehampaan (Baert, 2015, hal. 1). Momen Eksistensial ini menghadirkan tantangan dalam filsafat pendidikan untuk menghadirkan alternatif pemikiran yang relevan dalam menjawab semakin kompleksitasnya keberadaan manusia dengan berbagai multi-dimensi akibat dari perubahan-perubahan mendasar dalam tatanan masyarakat. Sehingga, filsafat pendidikan menggunakan pemikiran sudut pandang filsafat eksistensialitas Martin Heidegger yang memosisikan manusia sebagai subjek dengan berbagai kompleksitas pengalaman yang beragam sehingga termasuk aspek emosional dan spiritual, yang memperlihatkan keunikan dari masing-masing individu dalam menentukan hakikat dari

keberadaannya. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang mempelajari isu-isu yang berkaitan dengan eksistensi manusia, termasuk makna, tujuan, dan nilai dari keberadaan manusia, dengan fokus pada krisis eksistensial, kecemasan, ketakutan yang muncul akibat keabsurdan realitas, serta pentingnya autentisitas, keberanian, dan kebajikan dalam menghadapinya (Macquarrie, 1973, hal. 14–15; Solomon, 1970, hal. 1–2).

Pendidikan sebagai proses pengembangan identitas individu: Filsafat pendidikan mengakui pentingnya pendidikan dalam membantu individu menemukan dan mengembangkan identitas mereka. Dalam konteks masyarakat yang kompleks, individu sering mengalami kehilangan identitas dan perasaan terasing. Pendidikan bertujuan untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagi individu untuk menjalani eksplorasi diri, memahami nilai-nilai dan minat mereka sendiri, sehingga mereka dapat membangun identitas yang autentik dan bermakna. Pendidikan sebagai pembangunan otonomi individu: Filsafat pendidikan mengakui pentingnya otonomi individu dalam masyarakat. Individu perlu memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, mengambil keputusan yang bijaksana, dan bertindak secara mandiri. Pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang mendukung pengembangan otonomi individu, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam masyarakat dan menjadi agen perubahan yang bertanggung jawab. Pendidikan sebagai pembangunan hubungan sosial yang bermakna: Filsafat pendidikan mengakui pentingnya hubungan sosial dalam kehidupan individu. Masyarakat merupakan konteks sosial di mana individu berinteraksi dan membentuk hubungan dengan orang lain. Pendidikan bertujuan untuk membantu individu memahami pentingnya hubungan sosial yang bermakna, saling peduli, dan saling mendukung. Melalui pendidikan, individu diajarkan tentang nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan keadilan, yang memungkinkan mereka untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Akhirnya, filsafat pendidikan ini menekankan pentingnya pendidikan dalam membantu individu menemukan identitas mereka, mengembangkan otonomi, dan membangun hubungan sosial yang bermakna di dalam masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai sarana yang memberdayakan individu untuk hidup secara berarti dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Pandangan eksistensial Heideggerian terhadap program pendidikan kewarganegaraan menghasilkan perspektif alternatif tentang karakter kewarganegaraan dan pertanyaan-pertanyaan filosofis mengenai sifat dan moralitas kewarganegaraan. Pandangan ini menantang pemikiran konvensional tentang karakter kewarganegaraan, seperti yang terdapat dalam etika kewarganegaraan yang didasarkan pada filsafat Pancasila. Lebih lanjut, pemikiran eksistensial Heidegger yang mendalam mengenai kebebasan individu sebagai warga negara memberikan kontribusi penting. Pandangan eksistensialitas memandang bahwa cara individu sebagai warga negara menghadapi dilema moral sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang dibangun terhadap berbagai alternatif yang ada dalam eksistensi manusia. Oleh karena itu, perubahan dalam praktik pendidikan kewarganegaraan perlu dipertimbangkan untuk membangun etika kewarganegaraan yang berperan dalam pengambilan keputusan sebagai warga negara, dan pandangan alternatif tentang kewarganegaraan yang diinspirasi oleh pemikiran Heidegger.

Sehingga, artikel ini menjawab tentang: pertama, apa justifikasi penerapan perspektif Heideggerian tentang eksistensialitas dalam konteks program pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Kedua, Apa kritik perspektif Heideggerian tentang

eksistensialitas terhadap konstruksi pengetahuan dan penerapan nilai-nilai kewargaan dalam sistem pendidikan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis yang diperluas dengan metode *verstehen* (Bakker, 1984; Lyng, 2012). Pendekatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, pendekatan ini bertujuan untuk memahami literatur yang berkaitan dengan justifikasi penerapan perspektif Heideggerian tentang eksistensialitas dalam konteks program pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai teks, artikel, dan sumber daya lainnya yang membahas mengenai gagasan Heideggerian tentang eksistensialitas dan bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan dalam program pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang relevansi dan potensi keberhasilan penerapan perspektif Heideggerian tersebut.

Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkritisi perspektif Heideggerian tentang eksistensialitas dalam hubungannya dengan konstruksi pengetahuan dan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem pendidikan Indonesia. Melalui analisis kritis, peneliti akan mengevaluasi kelebihan, kekurangan, dan potensi dampak dari pendekatan Heideggerian terhadap pemahaman eksistensialitas dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks pendidikan Indonesia. Kritik tersebut akan mempertimbangkan apakah perspektif Heideggerian dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperbaiki atau mengembangkan sistem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, atau apakah ada kendala atau masalah yang perlu diatasi dalam menerapkannya.

Dengan menggunakan metode *verstehen*, peneliti akan berusaha untuk memahami makna, konteks, dan konsekuensi dari gagasan Heideggerian tentang eksistensialitas serta penerapannya dalam sistem pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Metode *verstehen*, yang diperkenalkan oleh Max Weber, melibatkan pemahaman mendalam dan empati terhadap fenomena sosial dan budaya yang dipelajari. Peneliti akan berusaha untuk memasuki dunia pemikiran Heidegger dan menggali pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsep eksistensialitasnya dapat diterapkan dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan metode *verstehen* untuk memahami justifikasi penerapan perspektif Heideggerian tentang eksistensialitas dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini juga melibatkan kritik terhadap perspektif Heideggerian tersebut dalam hubungannya dengan konstruksi pengetahuan dan penerapan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem pendidikan Indonesia (Ritzer & Goodman, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Justifikasi Perspektif Heideggerian dalam Konteks Program Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi Indonesia¹

1. Konsep Otentisitas pada Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam pandangan 'pendidikan otentik', konsep kebebasan mengambil makna yang lebih radikal, di mana kebebasan bukanlah sekadar melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga mengandung kebebasan dari batasan dan pemahaman terhadap keterbatasan. Pandangan ini berbeda dari pandangan tradisional yang hanya menekankan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa mempertimbangkan batasan. Dalam konteks ini, pemahaman dan penerimaan keterbatasan diri menjadi aspek sentral dari kebebasan sejati. Konsep otentisitas, yang dipengaruhi oleh pemikiran Heidegger, menekankan pentingnya memahami dan menerima keterbatasan diri sebagai bagian integral dari kebebasan yang sejati. *Notion of freedom* yang radikal yang diimplikasikan oleh 'pendidikan otentik' adalah kebebasan dari batasan, bukan kebebasan dalam mewujudkan batasan. Dalam hal ini, kebebasan tidak hanya dilihat sebagai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga sebagai kebebasan untuk memiliki batasan dan memahami keterbatasan tersebut. Konsep ini berbeda dari pandangan tradisional tentang kebebasan yang hanya melihat kebebasan sebagai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa mempertimbangkan batasan dan keterbatasan. Dalam pandangan 'pendidikan otentik', kebebasan sejati terletak pada pemahaman dan penerimaan keterbatasan diri sendiri, bukan pada penyangkalan atau penghindaran dari keterbatasan tersebut (Heidegger, 1962, hal. 259; Trubody, 2015, hal. 23). Pandangan 'pendidikan otentik' mengartikan kebebasan sebagai kebebasan dari batasan, bukan kebebasan dalam mewujudkan batasan. Ini berbeda dengan pandangan tradisional yang hanya melihat kebebasan sebagai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa mempertimbangkan batasan dan keterbatasan. Dalam pendidikan otentik, kebebasan sejati terletak pada pemahaman dan penerimaan keterbatasan diri sendiri, bukan pada penyangkalan atau penghindaran dari keterbatasan tersebut. Konsep otentisitas, yang terinspirasi oleh filsafat Heidegger, menekankan pentingnya memahami dan menerima keterbatasan diri sebagai bagian integral dari kebebasan yang sejati.

Penerapan konsep otentisitas dalam pendidikan, yang terinspirasi oleh filsafat Heidegger, menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap keterbatasan diri sebagai bagian dari kebebasan yang sejati. Namun, dalam konteks pendidikan terdapat perbedaan antara "utopia lemah" dan "utopia kuat", dan konsep otentisitas harus diterapkan secara hati-hati agar tidak memperkuat gagasan-gagasan distopia. Selain itu, pendidikan yang otentik harus memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu. Oleh karena itu, pendidikan yang otentik harus mengakui tantangan dan kesulitan yang terkait dengan mencapai pendidikan yang otentik (Trubody, 2015, hal. 28–29). Namun, dalam menerapkan konsep otentisitas dalam pendidikan, perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperkuat gagasan-gagasan distopia. Terdapat perbedaan antara "utopia lemah" dan "utopia kuat" dalam konteks pendidikan, dan konsep otentisitas harus diterapkan dengan kehati-hatian agar tidak memperkuat gagasan-gagasan distopia yang tidak realistis atau tidak realistis

secara berlebihan. Selain itu, pendidikan otentik juga harus memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu. Dalam mencapai pendidikan otentik, penting bagi pendidikan untuk mengakui tantangan dan kesulitan yang terkait, serta mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi pengalaman dan perkembangan individu.

Konsep kebebasan yang diimplikasikan oleh pendidikan otentik melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keterbatasan diri sebagai bagian dari kebebasan yang sejati. Kebebasan dalam konteks ini bukan hanya tentang melakukan apa yang diinginkan, tetapi juga tentang memahami batasan-batasan yang ada dan mengakui tantangan yang terkait dengan mencapai pendidikan otentik. Penerapan konsep otentisitas dalam pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperkuat gagasan-gagasan distopia, dan pendidikan otentik juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu. Dengan demikian, konsep kebebasan dalam pendidikan otentik melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap keterbatasan diri sebagai bagian integral dari kebebasan yang sejati. Penerapan konsep otentisitas dalam pendidikan harus berhati-hati agar tidak memperkuat gagasan distopia, sambil memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu.

2. Metafisika Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Perspektif Heidegger tentang pendidikan ontologis menekankan pentingnya memahami esensi keberadaan manusia dan hubungannya dengan dunia. Dia berpendapat bahwa krisis pendidikan saat ini bukan hanya masalah praktis atau struktural, tetapi juga memiliki akar ontologis yang lebih dalam. Dia mengusulkan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri, hubungan kita dengan dunia, dan makna keberadaan kita. Pendekatan ini menawarkan visi pendidikan yang lebih holistik dan menyeluruh, di mana tujuan utamanya bukan hanya mencapai keunggulan akademik atau kesuksesan materi, tetapi juga pengembangan pribadi yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitar kita. Dengan mengadopsi pendidikan ontologis, Heidegger berharap dapat mengatasi krisis pendidikan saat ini dan membawa perubahan positif dalam cara kita memahami dan mengalami pendidikan (Thomson, 2001, hal. 257). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Ontologis: Perspektif Heideggerian menawarkan pandangan bahwa pendidikan seharusnya lebih dari sekadar transfer pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan kewarganegaraan seharusnya juga berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri, hubungan kita dengan dunia, dan makna keberadaan kita. Pendekatan ini mengakui bahwa pendidikan harus melibatkan aspek ontologis manusia dan membantu individu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka.

Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat Fred Dallmayr (2013), seorang teori politik terkenal, menyelidiki perubahan dunia dari sistem negara tradisional Westphalia menjadi jaringan kosmopolitan yang saling terkait saat ini. Dalam penelitiannya, Dallmayr menjelajahi konsep "*being in the world*" (ada di dunia), yang dilihatnya sebagai bagian penting dari keterlibatan etis-politis. Ia mendorong pendekatan terhadap tantangan-tantangan saat ini melalui pendidikan kewarganegaraan untuk memperjuangkan politik kebaikan bersama yang memerlukan

pengembangan etika publik, dialog terbuka, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang saling peduli dan bertanggung jawab secara sosial. Mendorong Politik Kebaikan Bersama: Pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang diusulkan oleh Fred Dallmayr menekankan pentingnya pengembangan etika publik, dialog terbuka, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang saling peduli dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan ini mencoba menanggapi perubahan global dan menekankan pentingnya memahami konsekuensi mendalam dari globalisasi dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

Inti dari pemikiran ini adalah menyadari pentingnya memahami konsekuensi mendalam dari globalisasi dan merespons perubahan ini melalui pendidikan kewarganegaraan yang kosmopolitan dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini terinspirasi dari aliran pragmatisme, hermeneutika dan etika kebajikan dengan tidak menghilangkan ketegangan antara norma dan perilaku tetapi diredam melalui proses pendidikan dan transformasi etis seperti halnya proses menjembatani ketegangan antara global dan lokal dengan rekonsiliasi dalam bentuk tujuan atau visi kosmos bersama (Dallmayr, 2013, hal. 4). Kesadaran tentang kosmopolis merupakan perjalanan yang melampaui batasan pandangan sempit dari antroposentrisme, sehingga membutuhkan ruang yang luas untuk membangun argumentasi tentang pembaharuan kemanusiaan dalam pendidikan dengan melandasinya dengan etika dan wawasan spiritual dalam membangun kesadaran sebagai objek. Manusia harus memiliki juga membangun potensi dirinya dengan dimensi sebagai manusia. Kosmopolitanisme dan Kesadaran akan Ruang yang Luas: Pendekatan kosmopolitan dalam pendidikan kewarganegaraan mengajak untuk melampaui batasan pandangan sempit dan antroposentrisme. Hal ini mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang kemanusiaan dan membangun kesadaran sebagai objek. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan ruang yang luas untuk membangun argumentasi tentang pembaharuan kemanusiaan dengan landasan etika dan wawasan spiritual dalam membangun kesadaran individu sebagai manusia yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan yang holistik dalam pendidikan kewarganegaraan, yang melibatkan aspek ontologis, etis, dan kosmopolitan dalam membentuk warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Akhirnya ada dua argumen yang dibangun tentang justifikasi perspektif Heideggerian pada program pendidikan kewarganegaraan : Pertama, Justifikasi penerapan perspektif Heideggerian tentang eksistensialitas dalam konteks program pendidikan kewarganegaraan di Pendidikan Tinggi Indonesia membuka ruang untuk menggeser fokus dari kebebasan dalam mewujudkan batasan menjadi pemahaman dan penerimaan terhadap keterbatasan diri sebagai bagian integral dari kebebasan yang sejati; kedua, konsep otentisitas dalam pendidikan kewarganegaraan, yang terinspirasi oleh filsafat Heidegger, menekankan pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap keterbatasan diri sebagai bagian dari kebebasan yang sejati, namun perlu diterapkan dengan hati-hati untuk menghindari memperkuat gagasan distopia dan memperhatikan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi pengalaman individu.

Kritik Perspektif Heideggerian Terhadap Konstruksi Pengetahuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pandangan Heideggerian tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menawarkan kritik yang mengajak untuk melihat ulang konstruksi pengetahuan dalam pendidikan tersebut. Heidegger menyoroti bahwa sistem pendidikan cenderung terfokus pada transfer pengetahuan secara instrumental, tanpa memperhatikan pemahaman mendalam tentang eksistensialitas manusia. Kritik ini menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus lebih dari sekadar pemahaman faktual dan normatif, tetapi juga harus mencakup pemahaman yang lebih holistik tentang keberadaan manusia dalam konteks masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kritik ini mengajak untuk merenungkan bagaimana konstruksi pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan dapat lebih mengakomodasi dimensi ontologis dan eksistensialitas warga negara, serta mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan kritik perspektif Heideggerian ini, kita dapat memperkaya konstruksi pengetahuan dan implementasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Perspektif Heideggerian dengan konsep eksistensialnya dapat digunakan untuk membangun kritik terhadap program pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di Indonesia. Ada beberapa argumen kritik yang dapat dibangun yaitu: **pertama**, kondisi warga negara muda sebagai subjek modern yang berkembang ditengah gempuran ketidak menentuan yang diakibatkan percepatan kemajuan teknologi digital yang justru terjebak dalam situasi terbuang, ditinggalkan dan tersesat dalam ketiadaan yang tidak berujung yang akhirnya menghadirkan kecemasan dan keputusan berujung (Nietzsche, 1974, hal. 185). Warga negara muda saat ini menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak menentu dalam perkembangan mereka sebagai subjek modern. Percepatan kemajuan teknologi digital telah menciptakan dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka terjebak dalam situasi yang sering kali membuat mereka merasa terbuang, ditinggalkan, dan tersesat dalam keadaan yang tidak berujung. Dalam konteks ini, Nietzsche mengungkapkan bahwa kecemasan dan keputusan menjadi akibat yang tidak terhindarkan.

Dampak negatif dari kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi aspek psikologis individu, tetapi juga menghambat pembentukan dan penanaman keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) pada warga negara muda dalam situasi ketidakpastian ini, kemampuan individu untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang penting dalam konteks masyarakat menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh gangguan emosional dan ketidakstabilan yang dialami, yang mempengaruhi proses belajar dan perkembangan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Situasi ini akan menghambat pembentukan dan penanaman keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) (Branson, 1999; Lussier, 2019; Peart, Cubo-Delgado, & Gutiérrez-Esteban, 2022; Rachman, Nurgiansyah, & Kabatiah, 2021). Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan adalah mencari solusi untuk mengatasi situasi ini, agar pembentukan kompetensi kewarganegaraan pada warga negara muda dapat berlangsung secara optimal. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga negara muda serta implementasi strategi pendidikan yang memperhatikan aspek psikologis dan emosional mereka. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan, sehingga warga negara muda dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

Dampak negatif dari situasi kompleks yang dihadapi oleh warga negara muda dalam perkembangan mereka sebagai subjek modern, akibat terjebak dalam ketidakpastian dan kecemasan yang dihasilkan oleh percepatan teknologi digital, menghambat pembentukan dan penanaman keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), namun dapat diatasi melalui pemahaman mendalam terhadap permasalahan mereka dan implementasi strategi pendidikan yang memperhatikan aspek pengalaman individual, sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.

Kedua, penekanan terhadap individualisme, kebebasan, dan kemandirian dalam rangka pembentukan tatanan sosial kewarganegaraan dapat menghilangkan rasa komunalisme yang akan berdampak pada merenggangnya keterikatan sosial individu sebagai warga dalam ikatan sosial kewarganegaraan. Kondisi ini juga menghadirkan perasaan kesepian dan persepsi negatif terhadap ruang publik sebagai domain yang penuh kepalsuan (tidak otentik) dan korup. Sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu mempertimbangkan dalam membangun keseimbangan antara nilai-nilai individu dan tanggung jawab sosial sebagai warga yang berkomitmen terhadap masyarakat (Aho, 2014; Guignon, 2004; Taylor, 1992).

Keberadaan individu dalam konteks sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kehadiran individu yang utuh dan penuh mengacu pada pemahaman bahwa setiap individu memainkan peran penting dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk individu sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Konsep Heideggerian tentang individu sebagai cerminan sosial dan hubungan yang mendalam antara "aku" dan "liyan" relevan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan dalam masyarakat serta membangun hubungan yang inklusif dan saling mendukung. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu tidak hanya menjadi anggota masyarakat, tetapi juga memahami tanggung jawab mereka sebagai warga negara aktif dalam memajukan kesejahteraan sosial dan memperkuat ikatan sosial yang membentuk dasar dari kehidupan bersama (Kurniawan, 2022, hal. 29; Salsabila, Wahyuni, & Nurgiansyah, 2023).

Akhirnya, penekanan yang berlebihan terhadap individualisme, kebebasan, dan kemandirian dalam pembentukan tatanan sosial kewarganegaraan dapat mengarah pada kurangnya rasa keterikatan sosial individu terhadap masyarakat. Hal ini bisa berdampak negatif pada solidaritas dan kerjasama antar warga dalam membangun ikatan sosial kewarganegaraan yang kuat. Selanjutnya, ketika komunalisme terabaikan dalam pembentukan tatanan sosial kewarganegaraan, individu cenderung mengalami perasaan kesepian dan terasing dalam kehidupan sosial. Kehilangan rasa komunalisme ini dapat mengurangi rasa saling peduli, kebersamaan, dan kerja sama dalam masyarakat, yang merupakan aspek penting dalam membangun ikatan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Perasaan kesepian yang timbul akibat kurangnya rasa komunalisme juga dapat menghasilkan persepsi negatif terhadap ruang publik. Individu mungkin menganggap

ruang publik sebagai tempat yang penuh dengan kepalsuan, ketidakotentikan, dan korupsi, karena kurangnya interaksi sosial yang bermakna dan kurangnya partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan harus memperhatikan pentingnya menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai individu dan tanggung jawab sosial. Melalui pendidikan yang baik, individu dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya keterikatan sosial, rasa saling peduli, dan partisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan. Dengan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dan mengembangkan kesadaran sosial, pendidikan kewarganegaraan dapat membantu membangun ikatan sosial yang kokoh di antara warga negara yang berkomitmen terhadap kesejahteraan bersama.

Ketiga, perspektif eksistensialitas Heideggerian tentang “*existence precedes essence*” (eksistensi sebelum hakikat) yang pada awalnya menentang pandangan terdahulu bahwa hakikat lebih mendasar dan tetap daripada eksistensi. Pandangan eksistensialis manusia sebagai warga melalui kesadarannya menciptakan nilai-nilai dan menentukan makna hidupnya yang justru mengalami krisis identitas atau krisis nilai yang tidak melekat pada manusia sebagai warga negara. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan menghadapi suatu tantangan yang mendasar apakah pendidikan kewarganegaraan menekankan penting individu sebagai warga dalam membentuk makna keberadaannya atau eksistensinya melalui tindakan-tindakan yang membentuk dirinya sebagai warga atau sebagai dirinya sendiri. "Keberadaan mendahului hakikat," prinsip mendasar dalam eksistensialisme, menyoroti bahwa individu hadir terlebih dahulu sebelum memberikan makna pada hidupnya melalui pengalaman pribadi. Filsafat ini mendorong individu untuk merenungkan arti kehidupan dan menentukan kebenaran yang sesuai bagi mereka. Dalam ranah epistemologi eksistensialis, individu dianggap bertanggung jawab atas pengetahuan mereka sendiri, dengan pengalaman pribadi sebagai sumber utama pengetahuan. Eksistensialis percaya bahwa seorang guru ideal menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka, memungkinkan siswa untuk menggali tujuan dan identitas mereka sendiri. Siswa diberikan kesempatan yang cukup untuk mengejar minat mereka dan menjelajahi kedalaman diri mereka. Dialog, peran-peran, dan pendekatan lain yang memberikan kebebasan dan eksplorasi diri dianggap sesuai untuk pendidikan eksistensialis. Pada akhirnya, tujuan utama pendidikan adalah membangkitkan kesadaran individu terhadap tanggung jawab mereka dalam menciptakan makna dan mendefinisikan diri sendiri (Eribon, 2020; Rohmah, 2019, hal. 86)

Tetapi disini pendidikan kewarganegaraan akan mengkritik kembali pandangan eksistensialis yang cenderung mengabaikan keberadaan nilai-nilai kewarganegaraan yang justru melekat pada individu sebagai warga negara. Menurut eksistensialis, manusia melalui kesadarannya menciptakan nilai-nilai dan menentukan makna hidupnya karena tidak memiliki identitas atau nilai yang melekat, yang harus diciptakan oleh individu itu sendiri melalui tindakan-tindakan yang membentuk dirinya, sehingga menjadikan eksistensinya lebih berarti (Gilson, 2013; Solomon, 1970). Jika kita gunakan pandangan Heideggerian bahwa esensi atau hakikat keberadaan manusia terletak dalam eksistensinya, Pandangan ini menunjukkan bahwa manusia terlebih dahulu ada, menyadari keberadaannya, dan kemudian menentukan dirinya sendiri (Heidegger, 1977; Schroeder, 2006). Hal ini menawarkan implikasi positif dan terapeutik bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk memilih bertindak secara berbeda dan menjadi individu yang baik. Namun, dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, penting untuk menggabungkan pemahaman akan eksistensi individu

dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Pergeseran penekanan dalam pendekatan kemampuan, dari peluang berfungsi menjadi suara individu yang membuka ruang penolakan terhadap asumsi "fungsi berharga" dalam kehidupan yang bermartabat, merupakan penyesuaian yang penting dan disambut baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan subjek untuk muncul sebagai dirinya sendiri ('saya') menjadi fokus utama dalam pendekatan ini, memungkinkan individu manusia untuk menghadapi tantangan dan memimpin hidupnya sendiri (Reindal, 2021).

Proses penentuan nilai-nilai yang sah dan valid dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan sebuah tantangan yang kompleks (Hastangka & Ma'ruf, 2021, hal. 126). Jika dikaitkan dengan pemikiran Heideggerian eksistensial dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pentingnya memahami dan menghadapi persoalan penentuan nilai-nilai yang relevan dalam kehidupan sosial. Pemikiran Heideggerian eksistensial menunjukkan bahwa pengetahuan dan kebenaran tidaklah statis atau universal, melainkan terbentuk melalui interaksi dan pengalaman manusia dalam konteks sosial. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana yang penting untuk membekali individu dengan pemahaman tentang nilai-nilai yang sah dan valid dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajak untuk menguji dan mempertanyakan nilai-nilai yang ada, serta berperan aktif dalam menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan konteks sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, memahami dan menghadapi persoalan penentuan nilai-nilai dalam kehidupan sosial memerlukan pemahaman konsep Heideggerian eksistensial dan implementasi pendidikan kewarganegaraan yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat.

Pengembangan program pendidikan kewargaan pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia dapat mempertimbangkan kritik dari pandangan Heideggerian untuk membangun pendekatan yang seimbang antara pemberdayaan individu dalam mencari makna kehidupannya sendiri dengan pengembangan nilai kewargaan yang melekat pada individu sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan mampu menghadirkan warga negara yang memiliki modal intelektual sebagai seorang sarjana yang mampu memperkuat rasa tanggung jawab sosial dengan keterlibatan kewargaan (*civic engagement*) sebagai seorang warga negara muda dalam membangun ruang publik yang inklusif, berkeadilan dan harmonis (Ballard, Borden, & Perkins, 2021).

Akhirnya, kritik perspektif Heideggerian terhadap pendidikan kewarganegaraan adalah: **pertama**, pendekatan perspektif Heideggerian dalam program pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dari kompleksitas kondisi warga negara muda dalam perkembangan mereka sebagai subjek modern, dengan mengakui pentingnya pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi dan implementasi strategi pendidikan yang memperhatikan aspek psikologis dan emosional mereka. **Kedua**, pendidikan kewarganegaraan perlu membangun keseimbangan antara nilai-nilai individu dan tanggung jawab sosial sebagai warga yang berkomitmen terhadap masyarakat, dengan mempertimbangkan bahwa penekanan yang berlebihan pada individualisme, kebebasan, dan kemandirian dapat menghilangkan rasa komunalisme dan menghambat solidaritas serta kerjasama dalam membangun ikatan sosial kewarganegaraan yang kuat. **Ketiga**, dalam pengembangan program pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi di Indonesia, perlu mencari

pendekatan yang seimbang antara pemberdayaan individu dalam mencari makna kehidupannya sendiri dan pengembangan nilai-nilai kewarganegaraan yang melekat pada individu sebagai warga negara, dengan tujuan menciptakan warga negara muda yang memiliki modal intelektual dan tanggung jawab sosial yang kuat untuk membangun ruang publik yang inklusif, berkeadilan, dan harmonis. pendekatan perspektif Heideggerian dapat memberikan kontribusi penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dan dalam membentuk warga negara muda yang berdaya dan berkomitmen untuk membangun masyarakat yang lebih baik

SIMPULAN

Pertama, Konsep otentisitas dan pendidikan ontologis dalam pendidikan kewarganegaraan saling melengkapi untuk menciptakan pendekatan holistik dan menyeluruh dalam pengembangan pribadi dan tanggung jawab sosial individu sebagai warga negara, menghasilkan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri, tanggung jawab sosial, dan makna keberadaan, serta mampu mengatasi tantangan globalisasi dan perubahan dunia, dengan memperhatikan konteks sosial dan sejarah yang mempengaruhi individu, sehingga memungkinkan terciptanya masyarakat yang peduli, bertanggung jawab, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia.

Kedua, Pengembangan program pendidikan kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi di Indonesia perlu mempertimbangkan kritik dari perspektif Heideggerian untuk menciptakan pendekatan yang seimbang antara pemberdayaan individu dalam mencari makna kehidupan mereka sendiri dengan pengembangan nilai kewarganegaraan yang melekat pada individu sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan warga negara yang memiliki modal intelektual sebagai sarjana, sehingga mampu memperkuat rasa tanggung jawab sosial mereka melalui keterlibatan kewarganegaraan (civic engagement) sebagai warga negara muda dalam membangun ruang publik yang inklusif, adil, dan harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan pada Badan Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) atas pembiayaan studi penulis pada program Doktor Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aho, K. (2014). *Existentialism: an Introduction*. Cambridge: John Wiley & Sons.
- Baert, P. (2015). *The Existentialist Moment: The Rise of Sartre as a Public Intellectual*. Cambridge: John Wiley & Sons.
- Bakker, A. (1984). *The Methods of Philosophy*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ballard, J., Borden, L., & Perkins, D. F. (2021). Program Quality Components Related to Youth Civic Engagement. *Children and Youth Services Review*, *126*, 106022. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106022>
- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. Yogyakarta: YKIS.
- Dallmayr, F. (2013). *Being in the World: Dialogue and Cosmopolis*. <https://doi.org/10.5860/choice.51-4116>
- Eribon, D. (2020). Existence Precedes Essence. In M. A. Barale, J. Goldberg, M. Moon, & E. K. Sedgwick (Ed.), & M. Lucey (Penerj.), *Insult and the Making of the Gay Self* (hal. 107–112). <https://doi.org/10.1515/9780822385493-018>
- Gilson, E. (2013). *The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas*. Random House.
- Guignon, C. (2004). *On Being Authentic*. London: Routledge.
- Hastangka, H., & Ma'ruf, M. (2021). Metode Pancasila dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Kewarganegaraan*, *18*(2), 115–129. <https://doi.org/10.24114/JK.V18I2.23538>
- Heidegger, M. (1962). Being in Time. In J. Macquarrie & E. Robinson (Penerj.), *Women's Philosophy Review*. <https://doi.org/10.5840/wpr19941219>
- Heidegger, M. (1977). *Sein und Zeit* (German; F. W. von Herrmann, ed.). M. Niemeyer Tübingen.
- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2015). *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Kurniawan, I. P. B. (2022). Pergeseran Partisipasi Sosial (Masyarakat) dalam Masa Pandemi COVID-19 (Tinjauan Fenomenologis Individu Selama Pandemi COVID-19). *Jurnal Kewarganegaraan*, *19*(1), 16–32. <https://doi.org/10.24114/JK.V19I1.29453>
- Lussier, D. N. (2019). Mosques, Churches, and Civic Skill Opportunities in Indonesia. *Journal for the Scientific Study of Religion*, *58*(2), 415–438. <https://doi.org/10.1111/jssr.12589>
- Lyng, S. (2012). Existential Transcendence in Late Modernity: Edgework and Hermeneutic Reflexivity. *Human studies*, *35*(3), 401–414. <https://doi.org/10.1007/s10746-012-9242-0>
- Macquarrie, J. (1973). *Existentialism: An Introduction, Guide and Assessment*. Penguin Books.
- Nietzsche, F. (1974). *The Gay Science: With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs* (Walter Kaufmann, trans.). New York: Vintage.
- Peart, M., Cubo-Delgado, S., & Gutiérrez-Esteban, P. (2022). Exploring the Role of Digital and Socio-civic Skills for Promoting Youth Participation and Digital Citizenship. *European Journal of Educational Research*, *11*(2), 697–709. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.11.2.697>
- Rachman, F., Nurgiansyah, T. H., & Kabatiah, M. (2021). Profilisasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu*

- Pendidikan*, 3(5), 2970–2984. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1052>
- Reindal, S. M. (2021). Considering Diversity in (Special) Education: Disability, Being Someone and Existential Education. *Studies in Philosophy and Education*, 40(4), 365–380. <https://doi.org/10.1007/s11217-021-09758-9>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern* (Keenam). Jakarta: Kencana.
- Rohmah, L. (2019). Eksistensialisme dalam Pendidikan. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 86–100. <https://doi.org/10.32923/edugama.v5i1.960>
- Salsabila, N., Wahyuni, F. D., & Nurgiansyah, T. H. (2023). Peran Penting Civics: Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan di Era Masyarakat Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.24114/jk.v20i1.39530>
- Schroeder, W. R. (2006). Jean-Paul Sartre: Being and Nothingness. In J. Shand (Ed.), *Central Works of Philosophy v4: Twentieth Century: Moore to Popper* (hal. 155–176). London: Routledge.
- Solomon, R. C. (1970). *Existentialism*. 1970: McGraw-Hill Higher Education.
- Taylor, C. (1992). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press.
- Thomson, I. (2001). Heidegger on Ontological Education, or: How We Become What We Are. *Inquiry*, 44(3), 243–268. <https://doi.org/10.1080/002017401316922408>
- Trubody, B. (2015). Heidegger, Education and the ‘Cult of the Authentic.’ *Journal of Philosophy of Education*, 49(1), 14–31. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12093>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.